



Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 di SDN 1 Lehan Bumi Agung Lampung Timur

Kurnia Safitri Salahudin^{1*}, Frenki², Nurasari³

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

*Corresponding Author: kurniasafitri3048@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini adanya ketidaksesuaian antara tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan praktik pelaksanaannya di lapangan, khususnya terkait kualitas dan keamanan pangan yang diterima peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dalam pemenuhan gizi nasional di Sekolah Dasar Negeri 1 Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan kepala sekolah, lima orang guru, sepuluh siswa, serta kepala SPPG Bumi Tinggi sebagai penyedia makanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan secara administratif, namun belum didukung oleh pengawasan mutu yang memadai. Ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi, seperti olahan ayam yang mengalami penurunan kualitas serta kejadian keracunan yang diduga disebabkan oleh roti yang telah melewati masa konsumsi. Meskipun pihak sekolah telah melakukan penolakan terhadap makanan yang tidak memenuhi standar, langkah tersebut belum terintegrasi dalam sistem pengendalian mutu yang terstruktur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan masih berfokus pada distribusi tanpa diimbangi jaminan kualitas, sehingga diperlukan penguatan pengawasan, penetapan standar keamanan pangan, serta peningkatan akuntabilitas agar program dapat berjalan secara efektif dan aman bagi peserta didik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Keamanan Pangan, Pengawasan Mutu, Program Makan Bergizi Gratis.

Abstract: *This study identifies a discrepancy between the objectives of the Free Nutritious Meal Program (MBG) and its implementation in practice, particularly regarding the quality and safety of food received by students. The purpose of this research is to analyze the implementation of Article 3 of Presidential Regulation Number 83 of 2024 in fulfilling national nutritional needs at an elementary school in Bumi Agung District, East Lampung Regency. The study employs a qualitative approach with a field research design, using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation involving the school principal, five teachers, ten students, and the head of SPPG Bumi Tinggi as the food provider. The findings indicate that the program has been administratively implemented; however, it is not yet supported by adequate quality control. Cases of unfit food were identified, including processed chicken that had deteriorated in quality, as well as incidents of suspected food poisoning caused by expired bread. Although the school has taken preventive action by*

rejecting food that does not meet standards, such measures remain incidental and are not yet integrated into a structured quality control system. Therefore, it can be concluded that policy implementation is still focused on distribution without being balanced by quality assurance. Strengthening supervision, establishing clear food safety standards, and enhancing accountability are necessary to ensure the program is implemented effectively and safely for students.

Keywords: *Food safety, Free Nutritious Meal Program, Policy Implementation, Quality Control*

PENDAHULUAN

Pemenuhan gizi yang memadai, aman, dan bermutu merupakan fondasi penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan berdaya saing. Asupan nutrisi yang seimbang tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap perkembangan kognitif, kestabilan emosi, serta kemampuan individu dalam beradaptasi dengan tuntutan sosial dan pendidikan. Dalam konteks pembangunan nasional, kualitas gizi masyarakat menjadi indikator strategis yang menentukan keberhasilan suatu negara dalam menciptakan generasi yang mampu menghadapi tantangan global secara kompetitif.¹

Dalam kerangka penyelenggaraan negara modern, isu gizi tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab individual semata, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan umum. Negara memiliki peran aktif dalam memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh akses terhadap pangan yang layak, aman, dan bernilai gizi tinggi. Tanggung jawab ini mencakup tidak hanya aspek ketersediaan pangan, tetapi juga kualitas, keamanan, distribusi yang merata, serta pengawasan terhadap standar konsumsi yang diterima oleh masyarakat.²

Secara normatif, jaminan atas pemenuhan gizi berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Hak atas pangan yang layak merupakan bagian dari hak asasi yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi dan menyejahterakan rakyatnya.³ Dalam upaya merealisasikan tanggung jawab tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang menjadi landasan yuridis dalam penyelenggaraan program pemenuhan gizi secara nasional. Regulasi ini menegaskan bahwa pengelolaan gizi harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui lembaga yang memiliki otoritas dan kompetensi dalam bidang tersebut.⁴

Sebagai implementasi konkret dari kebijakan tersebut, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang difokuskan pada peserta didik, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan status gizi siswa, tetapi juga mendukung efektivitas proses pembelajaran melalui peningkatan konsentrasi dan

¹ Alfiyanti Nurkhasyanah, "Analisis Kondisi Ekonomi Orang Tua Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Anak Dalam Perkembangan Anak," *Journal of Early Childhood Education Studies* 5, no. 1 (2025): 116–31.

² Justicia Salsabila and Slamet Tri Wahyudi, "Politik Hukum Kebijakan Makan Bergizi Gratis Dalam Rangka Pemenuhan Gizi Kepada Ibu Hamil Guna Mencegah Stunting: Perspektif Ketahanan Pangan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8934–54.

³ Namrysilia Buti Anjawai et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Anak Atas Keamanan Pangan Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Kepulauan Riau," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 12, no. 1 (2026): 614–26.

⁴ Affandi Anwar Pohan, "Analisis Yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Siyash Dusturiyah" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2025).

daya tangkap siswa di dalam kelas. Dengan terpenuhinya kebutuhan nutrisi yang optimal, diharapkan peserta didik dapat mengikuti kegiatan pendidikan secara lebih maksimal.⁵

Namun demikian, keberhasilan program ini tidak dapat diukur semata-mata dari tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat. Lebih dari itu, kualitas, kebersihan, serta keamanan pangan yang disajikan menjadi faktor krusial yang menentukan efektivitas program secara keseluruhan. Ketidaksiuaian dalam aspek tersebut justru dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti gangguan kesehatan, menurunnya kepercayaan masyarakat, hingga kegagalan dalam mencapai tujuan program yang telah dirancang.

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 1 Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai salah satu lokasi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan penyedia makanan dari SPPG Bumi Tinggi. Penelitian ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program, meliputi tenaga pendidik, peserta didik, serta pihak penyedia makanan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan pemahaman terhadap program. Informan terdiri atas kepala sekolah sebagai penanggung jawab di tingkat satuan pendidikan, lima orang guru sebagai pengawas pelaksanaan harian, sepuluh siswa sebagai penerima manfaat langsung, serta kepala SPPG Bumi Tinggi sebagai pihak penyedia makanan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), yang bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris secara mendalam mengenai implementasi kebijakan di tingkat operasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kondisi makanan yang diterima siswa, wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi dari para informan, serta dokumentasi sebagai data pendukung guna memperkuat validitas temuan penelitian.⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya dalam menjaga konsistensi kualitas dan keamanan pangan. Dalam beberapa kesempatan, ditemukan adanya indikasi penurunan mutu makanan, yang ditandai dengan perubahan tekstur, aroma, serta kondisi fisik makanan yang tidak sesuai dengan standar kelayakan konsumsi. Salah satu temuan yang cukup signifikan adalah adanya menu olahan ayam yang menunjukkan ciri tidak segar, seperti berlendir dan mengeluarkan bau yang kurang sedap, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan konsumsi bagi siswa.

Temuan tersebut diperkuat melalui hasil wawancara dengan berbagai informan. Kepala sekolah mengungkapkan bahwa pihaknya pernah mengambil langkah tegas dengan menolak makanan yang dikirim karena dinilai tidak memenuhi standar kelayakan. Guru sebagai pengawas juga mengidentifikasi adanya perubahan kualitas makanan sebelum didistribusikan kepada siswa. Di sisi lain, beberapa siswa menyampaikan pengalaman menerima makanan dengan rasa yang tidak biasa dan menimbulkan ketidaknyamanan saat dikonsumsi. Sementara itu, pihak penyedia makanan mengakui adanya beberapa kendala dalam proses produksi dan distribusi, termasuk kejadian penurunan kualitas pada menu tertentu serta kasus keracunan yang diduga berasal dari konsumsi makanan yang tidak lagi layak.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi seharusnya tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan standar operasional prosedur, serta

⁵ Hana Afifah Rahmah et al., "Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis Di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 2 Mei (2025): 2855–66.

⁶ Iwan Abdy, I Wayan Lasmawan, and Desak Putu Parmiti, "TRIANGULASI PERSEPSI: ANALISIS KOMPARATIF EVALUASI GURU, ORANG TUA, DAN SISWA TERHADAP PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS DI SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN PAKIS, KABUPATEN MALANG," *Joyful Learning Journal* 14, no. 4 (2025): 392–402.

evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga secara konsisten.

Dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan publik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesionalitas, dan orientasi pada kemaslahatan umum. Setiap kebijakan tidak hanya dinilai dari tujuan normatifnya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Prinsip utama dalam pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan (*maslahah*) serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*), termasuk dalam hal perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*).⁷

Dengan demikian, setiap bentuk kelalaian dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan dapat dipandang sebagai bentuk ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip tersebut, karena berpotensi menimbulkan mudarat bagi masyarakat, khususnya peserta didik sebagai kelompok yang rentan. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang benar-benar dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, serta kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam memahami implementasi kebijakan pemenuhan gizi nasional secara lebih komprehensif. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah, pihak sekolah, serta penyedia layanan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu menjamin keamanan dan kelayakan pangan bagi seluruh peserta didik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan pemenuhan gizi nasional pada tingkat satuan pendidikan dasar⁸. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara komprehensif melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian serta pengamatan terhadap situasi yang terjadi⁹.

Lokasi penelitian berada di Sekolah Dasar Negeri 1 Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan salah satu penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan penyedia makanan dari SPPG Bumi Tinggi. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya temuan empiris terkait permasalahan kualitas dan keamanan makanan yang didistribusikan kepada peserta didik.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, yaitu tenaga pendidik, peserta didik, serta pihak penyedia makanan. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program. Sampel penelitian terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab program di tingkat sekolah, lima orang guru sebagai pengawas pelaksanaan, sepuluh orang siswa sebagai penerima manfaat, serta kepala SPPG Bumi Tinggi sebagai pihak penyedia makanan.

⁷ Erika Maharani, "Kajian Tafsir Maqashidi: Studi Analisis Ayat-Ayat Hifz Al-Nafs Dalam Al-Qur'an," *Wahyain: Journal of Quranic Sociology and Hadith* 1, no. 2 (2025): 18–29.

⁸ Nurul Muslihah et al., *Penelitian Kualitatif Gizi* (Universitas Brawijaya Press, 2022).

⁹ Alvin Rivaldi, Fahrul Ulum Feriawan, and Mutaqqin Nur, "Metode Pengumpulan Data Melalui Wawancara," *Sebuah Tinjauan Pustaka* 16 (2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi¹⁰. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati kondisi fisik makanan yang diterima siswa, termasuk aspek tampilan, aroma, dan kelayakan konsumsi¹¹. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada kepala sekolah, guru, siswa, dan kepala SPPG guna menggali informasi secara mendalam terkait proses distribusi, pengawasan, serta pengalaman dalam pelaksanaan program. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa catatan, foto, maupun dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di SD Negeri 1 Lehan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan, khususnya dalam hal distribusi makanan kepada peserta didik. Makanan dibagikan secara rutin dan terjadwal oleh pihak penyedia, sehingga seluruh siswa tetap menerima makanan sesuai dengan ketentuan program. Dari sisi teknis dan administratif, pelaksanaan program ini dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek kualitas dan keamanan makanan. Dari hasil pengamatan di lapangan, ditemukan bahwa beberapa makanan yang diterima siswa berada dalam kondisi kurang layak, seperti perubahan tekstur, aroma yang tidak wajar, dan kondisi fisik yang tidak sesuai dengan standar konsumsi. Selain itu, terdapat kejadian siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan, yang diduga berkaitan dengan makanan yang sudah tidak layak.

Hasil wawancara dengan pihak sekolah juga menunjukkan bahwa makanan dengan kondisi kurang baik pernah diterima dan bahkan harus ditolak sebelum dibagikan kepada siswa. Hal ini menandakan bahwa kualitas makanan yang diberikan belum konsisten dan belum sepenuhnya terjamin keamanannya.

Selain masalah kualitas, penelitian ini juga menemukan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan. Tidak terdapat mekanisme pemeriksaan yang jelas sebelum makanan didistribusikan kepada siswa. Pihak sekolah hanya menerima makanan dalam kondisi siap saji tanpa adanya prosedur pengecekan yang terstruktur. Pengawasan yang dilakukan masih bersifat situasional dan belum menjadi bagian dari sistem yang terencana.

Kurangnya koordinasi antara pihak sekolah dan penyedia makanan juga menjadi salah satu kendala. Belum adanya standar kualitas yang disepakati bersama menyebabkan perbedaan penilaian terhadap kelayakan makanan. Di sisi lain, keterbatasan tenaga yang memiliki pemahaman di bidang keamanan pangan turut memengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan.

Dari segi dampak, kondisi ini memberikan pengaruh langsung terhadap peserta didik. Beberapa siswa mengalami keluhan fisik seperti mual dan ketidaknyamanan setelah mengonsumsi makanan. Selain itu, pengalaman tersebut juga berdampak pada menurunnya minat siswa terhadap program. Hal ini tentu dapat menghambat tujuan utama program, yaitu meningkatkan status gizi sekaligus mendukung proses pembelajaran.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 1 Lehan telah berjalan pada aspek distribusi, tetapi belum optimal dalam hal kualitas, keamanan, dan pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih

¹⁰ Baren Sipayung, Sarosa Hamongpranoto, and Nur Arifudin, "Aspek Teoritik Tentang Relevansi Kajian Hukum Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Realism: Law Review* 2, no. 1 (2024): 1–20.

¹¹ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan," *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211.

terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan pelaksanaannya di lapangan, sehingga diperlukan perbaikan yang lebih menyeluruh agar program dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peserta didik.

Pembahasan

1. Implementasi Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dalam Pelaksanaan Pemenuhan Gizi Nasional di SD Negeri 1 Lehan

Implementasi Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 pada hakikatnya menegaskan bahwa negara memegang peran sentral dalam menjamin pemenuhan gizi nasional melalui sistem yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.¹² Norma ini tidak berhenti pada kewajiban administratif berupa distribusi makanan, melainkan mengandung tanggung jawab substantif untuk memastikan bahwa pangan yang diberikan memenuhi standar kualitas, keamanan, serta kelayakan konsumsi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan harus dinilai secara komprehensif, mencakup dimensi distribusi, mutu, pengawasan, dan dampak nyata bagi peserta didik.

Dalam praktiknya di SD Negeri 1 Lehan, Kecamatan Bumi Agung, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan secara operasional, khususnya pada aspek distribusi. Penyaluran makanan oleh SPPG Bumi Tinggi dilakukan secara rutin dan terjadwal, serta menjangkau seluruh peserta didik sebagai sasaran program. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif dan teknis, kebijakan telah diimplementasikan sesuai dengan kerangka yang ditetapkan pemerintah.

Namun demikian, apabila ditelaah secara lebih mendalam, implementasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan substansi Pasal 3 yang menuntut integrasi antara kuantitas distribusi dan kualitas hasil. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa kualitas makanan yang diterima siswa tidak selalu berada dalam kondisi layak konsumsi. Beberapa makanan mengalami penurunan mutu, ditandai dengan perubahan tekstur, aroma, bahkan kondisi fisik yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Selain itu, terdapat kejadian keracunan yang diduga berasal dari konsumsi makanan kedaluwarsa, yang berdampak langsung pada kondisi kesehatan peserta didik.

a. Permasalahan Kualitas Makanan dan Keamanan Pangan

Permasalahan kualitas makanan menjadi temuan utama dalam penelitian ini. Ditemukan bahwa beberapa menu, khususnya olahan ayam, mengalami penurunan kualitas seperti berlendir dan berbau tidak sedap. Kondisi ini menunjukkan bahwa standar pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan belum dijalankan secara konsisten. Temuan ini diperkuat oleh keterangan pihak sekolah yang menyatakan bahwa makanan dengan kondisi tidak layak pernah diterima dan bahkan harus ditolak sebagai langkah pencegahan.

Selain itu, kejadian keracunan akibat konsumsi roti kedaluwarsa menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan belum terjamin secara optimal. Fakta ini menegaskan bahwa permasalahan kualitas pangan bukan sekadar indikasi, melainkan kondisi nyata yang terjadi dan berdampak langsung terhadap kesehatan peserta didik.

b. Kelemahan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Mutu

Permasalahan kualitas tidak dapat dilepaskan dari lemahnya sistem pengawasan. Tidak adanya mekanisme pemeriksaan yang terstruktur sebelum distribusi menyebabkan makanan diterima tanpa proses verifikasi kelayakan yang jelas. Sekolah berada pada

¹² dewan Perwakilan Daerah, "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 16/Dpd Ri/I/2021-2022 Tentang Rancangan Undang-Undang," n.d.

posisi pasif sebagai penerima akhir, sementara tindakan pengawasan yang dilakukan masih bersifat reaktif.

Selain itu, belum adanya standar mutu yang disepakati antara pihak sekolah dan penyedia makanan menimbulkan perbedaan persepsi dalam menilai kelayakan pangan. Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang keamanan pangan, semakin memperlemah sistem pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian mutu belum terintegrasi dari tahap produksi hingga distribusi.

c. Dampak terhadap Kesehatan dan Efektivitas Program

Kualitas makanan yang tidak terjamin memiliki dampak langsung terhadap kesehatan peserta didik, seperti mual, penurunan kondisi fisik, serta gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, pengalaman negatif dalam mengonsumsi makanan juga berdampak pada menurunnya minat dan kepercayaan siswa terhadap program.

Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka tujuan utama program dalam meningkatkan kualitas gizi dan mendukung proses pembelajaran tidak akan tercapai secara optimal. Program yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia justru berpotensi kehilangan efektivitasnya.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa implementasi Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 di SD Negeri 1 Lehan telah berjalan pada aspek distribusi, namun belum optimal pada aspek kualitas, keamanan, dan pengawasan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma kebijakan dan realitas pelaksanaan di lapangan.

2. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfīziyyah terhadap Implementasi Kebijakan

Dalam perspektif *fiqh siyasah tanfīziyyah*, pelaksanaan kebijakan publik merupakan manifestasi nyata dari amanah kekuasaan (*wilāyah*) yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi moral, etis, dan spiritual.¹³ Kekuasaan eksekutif tidak cukup dinilai dari kemampuannya dalam merumuskan kebijakan, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan secara adil, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan serta dampak konkret yang dirasakan oleh masyarakat.

Dalam konteks implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 1 Lehan, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Adanya makanan yang tidak layak konsumsi serta kejadian keracunan menunjukkan bahwa kebijakan belum mampu memberikan perlindungan optimal kepada peserta didik sebagai penerima manfaat utama. Kondisi ini menandakan bahwa amanah kekuasaan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik, karena kebijakan yang seharusnya menghadirkan kemaslahatan justru masih mengandung potensi mudarat.

Landasan utama dalam analisis ini adalah *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa), yang menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan publik.¹⁴ Dalam kaidah fikih ditegaskan:

¹³ Abdul Wadud Nafis, "Etika Lingkungan Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Kebijakan Publik," *Journal Syariah Law Review (Vol. 1)(No. 1)*, 2026.

¹⁴ Chindya Puspa Devi and Aminuddin Aminuddin, "Maqāsid Al-Syarī 'Ah Sebagai Basis Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 9, no. 2 (2025): 185–95.

"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"

(Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain)

Kaidah ini memberikan penegasan bahwa setiap kebijakan yang berpotensi menimbulkan bahaya harus dicegah. Dalam konteks program MBG, distribusi makanan yang tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip tersebut, karena membuka peluang terjadinya gangguan kesehatan bagi peserta didik. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek perlindungan terhadap jiwa belum terpenuhi secara optimal dalam implementasi kebijakan.

Menjadi parameter utama dalam menilai keseimbangan antara manfaat dan risiko. Program MBG secara normatif dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi dan mendukung proses pendidikan. Namun, ketika dalam pelaksanaannya muncul risiko seperti keracunan dan penurunan kualitas makanan, maka hal tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan dan realisasi kebijakan. Dalam perspektif syariah, kondisi ini menandakan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mencapai tujuan kemaslahatan yang diharapkan.

Dalam aspek tanggung jawab, *fiqh siyasah tanfiziyyah* menekankan prinsip *amānah* dan *mas'uliyah* sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kebijakan. Allah SWT berfirman:

"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا"

(*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya*) (QS. An-Nisā': 58)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap pelaksana kebijakan memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang berkualitas, aman, dan bertanggung jawab. Kelemahan dalam menjaga mutu makanan serta kurangnya pengawasan menunjukkan bahwa amanah tersebut belum dijalankan secara maksimal, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Lebih lanjut, dalam kerangka *fiqh siyasah tanfiziyyah*, pengawasan merupakan elemen krusial yang dikenal dengan konsep *al-rāqabah wa al-muḥāsabah*. Prinsip ini menuntut adanya sistem kontrol yang terstruktur, berkelanjutan, dan bersifat preventif. Namun, dalam implementasi program ini, ketiadaan mekanisme pengawasan yang sistematis menunjukkan bahwa fungsi kontrol belum berjalan secara optimal. Pengawasan yang masih bersifat reaktif memperlihatkan lemahnya sistem pengendalian mutu, sehingga potensi penurunan kualitas makanan tidak dapat dicegah sejak awal.

Selain itu, prinsip keadilan (*al-'adālah*) juga menjadi tolok ukur penting dalam menilai kebijakan publik. Allah SWT berfirman:

"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ"

(*Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebaikan*) (QS. An-Naḥl: 90)

Keadilan dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai pemerataan distribusi, tetapi juga mencakup kesetaraan dalam kualitas layanan. Peserta didik berhak memperoleh makanan yang aman, layak, dan bergizi. Ketidak konsistenan kualitas makanan menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya terwujud dalam pelaksanaan program.

Secara lebih luas, *fiqh siyasah tanfiziyyah* memandang kebijakan publik sebagai instrumen strategis untuk mencapai kesejahteraan (*falāḥ*) masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Program MBG seharusnya menjadi investasi fundamental dalam membangun

generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Namun, tanpa penguatan sistem kualitas, pengawasan yang terintegrasi, serta komitmen terhadap nilai-nilai amanah dan keadilan, tujuan strategis tersebut berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Dengan demikian, secara menyeluruh dapat dipahami bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis di SD Negeri 1 Lehan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah tanfiziyyah*, baik dalam aspek perlindungan jiwa, kemaslahatan, tanggung jawab, pengawasan, maupun keadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut dimensi normatif dan etis dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang preventif dan terintegrasi, penegakan standar kualitas pangan yang konsisten, serta peningkatan akuntabilitas seluruh pihak yang terlibat, agar kebijakan yang dijalankan tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga benar-benar mampu menghadirkan kemaslahatan, mencegah kemudharatan, dan selaras dengan nilai-nilai syariah secara utuh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SD Negeri 1 Lehan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk implementasi Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 sudah berjalan dari sisi distribusi, namun belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya. Makanan memang telah disalurkan secara rutin dan menjangkau seluruh siswa, tetapi masih ditemukan permasalahan pada kualitas dan keamanan pangan.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa makanan yang diterima siswa tidak dalam kondisi layak konsumsi, seperti perubahan tekstur, aroma, dan kondisi fisik. Bahkan terdapat kejadian gangguan kesehatan yang diduga berasal dari makanan yang sudah tidak layak. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kualitas dan keamanan pangan belum menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program.

Selain itu, sistem pengawasan juga masih lemah. Tidak adanya mekanisme pengecekan yang jelas sebelum makanan dibagikan membuat sekolah hanya menerima makanan tanpa proses kontrol yang memadai. Pengawasan yang dilakukan masih bersifat sementara dan belum menjadi bagian dari sistem yang terstruktur. Kurangnya koordinasi antara pihak sekolah dan penyedia makanan juga memperkuat kondisi ini.

Jika dilihat dari dampaknya, kondisi tersebut tidak hanya berpengaruh pada kesehatan siswa, tetapi juga menurunkan minat dan kepercayaan terhadap program. Hal ini tentu berpotensi menghambat tujuan utama program dalam meningkatkan gizi dan mendukung proses belajar.

Dari sisi kajian *fiqh siyasah tanfidziyah*, pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tanggung jawab, kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Kebijakan yang seharusnya memberikan manfaat justru masih menyisakan risiko, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan belum sejalan dengan nilai-nilai yang seharusnya menjadi dasar dalam kebijakan publik.

Saran

Perlu adanya penguatan pengawasan yang terstruktur dan konsisten dari pemerintah agar kualitas dan keamanan makanan tetap terjaga sejak proses produksi hingga distribusi. Pihak penyedia makanan diharapkan lebih menjaga standar pengolahan dan penyimpanan agar tidak terjadi penurunan mutu yang berdampak pada kesehatan siswa. Sekolah juga sebaiknya berperan lebih aktif dalam melakukan pengecekan awal sebelum makanan dibagikan, sehingga potensi masalah dapat dicegah sejak dini. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat

memperluas kajian agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan program pemenuhan gizi di berbagai wilayah.

DAFTAR PIUSTAKA

- Abdy, Iwan, I Wayan Lasmawan, and Desak Putu Parmiti. "Triangulasi Persepsi: Analisis Komparatif Evaluasi Guru, Orang Tua, Dan Siswa Terhadap Program Makanan Bergizi Gratis Di Sekolah Dasar Di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang." *Joyful Learning Journal* 14, no. 4 (2025): 392–402.
- Abdul Wadud Nafis, "Etika Lingkungan Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Kebijakan Publik," *Journal Syariah Law Review (Vol. 1)(No. 1)*, 2026.
- Affandi Anwar Pohan, "Analisis Yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Siyash Dusturiyah" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2025).
- Alfiyanti Nurkhasyanah, "Analisis Kondisi Ekonomi Orang Tua Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Anak Dalam Perkembangan Anak," *Journal of Early Childhood Education Studies* 5, no. 1 (2025): 116–31.
- Anjawai, Namrysilia Buti, Rika Permatasari, Dimas Adam Satrio Rachmadhanto, and Fhlorida Agustina Simanjuntak. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Anak Atas Keamanan Pangan Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Kepulauan Riau." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 12, no. 1 (2026): 614–26.
- Chindya Puspa Devi and Aminuddin Aminuddin, "Maqāsid Al-Syarī 'Ah Sebagai Basis Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 9, no. 2 (2025): 185–95.
- Daerah, Dewan Perwakilan. "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 16/Dpd Ri/I/2021-2022 Tentang Rancangan Undang-Undang," N.D.
- Devi, Chindya Puspa, And Aminuddin Aminuddin. "Maqāsid Al-Syarī 'Ah Sebagai Basis Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 9, No. 2 (2025): 185–95.
- Hana Afifah Rahmah et al., "Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis Di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 2 Mei (2025): 2855–66.
- Iwan Abdy, I Wayan Lasmawan, and Desak Putu Parmiti, "TRIANGULASI PERSEPSI: ANALISIS KOMPARATIF EVALUASI GURU, ORANG TUA, DAN SISWA TERHADAP PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS DI SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN PAKIS, KABUPATEN MALANG," *Joyful Learning Journal* 14, no. 4 (2025): 392–402.
- Justicia Salsabila and Slamet Tri Wahyudi, "Politik Hukum Kebijakan Makan Bergizi Gratis Dalam Rangka Pemenuhan Gizi Kepada Ibu Hamil Guna Mencegah Stunting: Perspektif Ketahanan Pangan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8934–54.
- Namrysilia Buti Anjawai et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Anak Atas Keamanan Pangan Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Kepulauan Riau," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 12, no. 1 (2026): 614–26.
- Maharani, Erika. "Kajian Tafsir Maqashidi: Studi Analisis Ayat-Ayat Hifz Al-Nafs Dalam Al-Qur'an." *Wahyain: Journal Of Quranic Sociology And Hadith* 1, No. 2 (2025): 18–29.
- Muslihah, Nurul, Intan Yusuf Habibie, Widya Rahmawati, Fajar Ari Nugroho, And Catur Saptaning Wilujeng. *Penelitian Kualitatif Gizi*. Universitas Brawijaya Press, 2022.
- Nafis, Abdul Wadud. "Etika Lingkungan Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Kebijakan Publik." *Journal Syariah Law Review (Vol. 1)(No. 1)*, 2026.

- Nurkhasyanah, Alfiyanti. "Analisis Kondisi Ekomomi Orang Tua Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Anak Dalam Perkembangan Anak." *Journal Of Early Childhood Education Studies* 5, No. 1 (2025): 116–31.
- Pohan, Affandi Anwar. "Analisis Yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasioal Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah." Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2025.
- Rahmah, Hana Afifah, Adelia Anggraini, Yuyun Putri Nilasari, And Enjelly Putri Salsabilla. "Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis Di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025." *Integrative Perspectives Of Social And Science Journal* 2, No. 2 Mei (2025): 2855–66.
- Rivaldi, Alvin, Fahrul Ulum Feriawan, And Mutaqqin Nur. "Metode Pengumpulan Data Melalui Wawancara." *Sebuah Tinjauan Pustaka* 16 (2023).
- Salsabila, Justicia, And Slamet Tri Wahyudi. "Politik Hukum Kebijakan Makan Bergizi Gratis Dalam Rangka Pemenuhan Gizi Kepada Ibu Hamil Guna Mencegah Stunting: Perspektif Ketahanan Pangan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 6 (2025): 8934–54.
- Sipayung, Baren, Sarosa Hamongpranoto, And Nur Arifudin. "Aspek Teoritik Tentang Relevansi Kajian Hukum Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Realism: Law Review* 2, No. 1 (2024): 1–20.
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan." *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, No. 2 (2024): 198–211.